

**ISU KEBIJAKAN TRANS PACIFIC PARTNERSHIP
DALAM KAMPANYE CALON PRESIDEN AMERIKA 2016
DAN RELEVANSINYA BAGI INDONESIA**

Imron Rosyadi Hamid

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Raden Rahmat Malang

Email : imron_hamid@yahoo.com

ABSTRAKSI

Sejak ditandatanganinya Trans Pacific Partnership (TPP) oleh Pemerintahan Obama pada Bulan Pebruari 2016, kelompok yang anti dan pro TPP muncul selama kampanye presiden Amerika Serikat. Baik Hillary Clinton maupun Donald Trump sama-sama menyuarakan untuk melawan kesepakatan Trans Pacific Partnership. Penelitian ini menjelaskan peranan platform partai baik Platform Partai Republik 2016 maupun Platform Partai Demokrat 2016 sebagai timbangan untuk mencari informasi penting yang berhubungan dengan isu Trans Pacific Partnership selama kampanye presiden Amerika Serikat Tahun 2016. Di pihak lain, setelah pertemuannya dengan Presiden Obama di Bulan Oktober 2015 di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia siap bergabung dengan Trans Pacific Partnership. Dengan menggunakan Teori Dependensia, penelitian ini akan menjelaskan mengapa sebuah kesepakatan perdagangan bebas seperti Trans Pacific Agreement harus diukur dengan kepentingan nasional sebelum diterapkan sebagai sebuah kebijakan pemerintahan.

Kata kunci : *Trans Pacific Partnership, dependensia*

ABSTRACT

Since the signed of Trans Pacific Partnership (TPP) by Obama Administration on February 2016, the anti and pro TPP has been raising in US Presidential Campaign. Both Hillary Clinton and Donald Trump have vowed to oppose the Trans Pacific Partnership Agreement. The research describes the role of party platform: Republican Platform 2016 and 2016 Democratic Party Platform as weights to get some important informations relating Trans Pacific Partnership's issue during the 2016 US presidential campaign. Meanwhile, after his meeting with Presiden Obama in USA, October 2015, Indonesia's President, Joko Widodo has declared that Indonesia is ready to join The Trans Pacific Partnership. By applying Dependency Theory, this research will discribe why a Free Trade Agreement such Trans Pacific Partnership has to be measured by national interest before push it as governmental policy.

Keywords : *Trans Pacific Partnership, dependency*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan Presiden Amerika Serikat tinggal menghitung hari, tepatnya tanggal 8 Nopember 2016, terlepas siapa nanti yang terpilih menjadi Presiden pengganti Barack Obama, salah satu isu menarik yang menjadi perdebatan seru dalam kampanye Presiden Amerika 2016 baik Hillary dari Partai Demokrat ataupun Donald Trump dari Partai Republik adalah masalah perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) yang menempatkan Amerika sebagai salah satu penggagasnya. Perjanjian perdagangan yang ditandatangani 12 negara ini, termasuk beberapa anggota ASEAN, ternyata memunculkan pro dan kontra tidak saja karena ditandatangani di masa akhir jabatan Presiden Obama yang hampir habis tahun ini, tetapi juga menyangkut isi dari perjanjian TPP itu sendiri yang dianggap sensitif bagi perekonomian Amerika Serikat.

Di luar Amerika juga terjadi perkembangan menarik, pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat Bulan Oktober 2015, muncul pernyataan tentang keinginan Indonesia masuk menjadi Anggota TPP. Tentu saja, sebagaimana terjadi di Amerika, keinginan Presiden Jokowi tersebut juga menuai pro dan kontra di dalam negeri.

Tulisan ini ingin membahas isu dan persoalan Trans Pacific Partnership dalam proses kampanye pemilihan Presiden di Amerika 2016 yang dilakukan Calon Presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump serta relevansinya untuk pembuatan kebijakan Pemerintah Indonesia ke depan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini Trans Pacific Partnership (TPP) akan kita kaji dalam konteks kepentingan nasional dan global. Trans Pacific Partnership menjadi salah satu isu ekonomi politik yang sering disuarakan oleh dua kandidat Presiden Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton dan Donald J. Trump, keduanya mewakili dua partai besar di Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik. Di luar Amerika, ternyata ada banyak negara yang kini justru ingin bergabung ke TPP, termasuk Indonesia, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika pada Bulan Oktober 2015.

Berkaitan dengan hal di atas, pertanyaan muncul dalam penelitian ini :

1. Apakah pertimbangan Amerika ikut membentuk Trans Pacific Partnership bersama sebelas negara lainnya?

2. Mengapa Trans Pacific Partnership yang ditandatangani Pemerintahan Obama mendapat sorotan tajam dalam kampanye Calon Presiden Amerika 2016?
3. Dalam konteks kerjasama internasional, apakah Indonesia perlu bergabung dengan Trans Pacific Agreement? Apa untung ruginya bagi Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membedah salah satu isu ekonomi politik dalam kampanye Calon Presiden 2016 antara Hillary Clinton dan Donald Trump berkait masalah Trans Pacific Partnership. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan pemerintahan, terutama Indonesia dalam konteks pembuatan kerjasama perdagangan internasional.

D. Kerangka Teori

Dalam studi hubungan internasional ataupun geopolitik dikenal Teori Dependensia. Coulombis dan Wolfe menyebut dependensia sebagai salah satu kriteria untuk mendefinisikan kepentingan nasional. Kriteria ini disebut *Foreign Dependency Criteria*¹ yang umumnya diterapkan pada negara-negara dengan ukuran kecil dan menengah yang pemerintahannya sangat bergantung pada '*protectors*' atau 'negara penjamin' yakni negara-negara besar atau superpower. Penelitian berkait Trans Pacific Partnership ini akan menggunakan Teori Dependensia sebagai pisau analisisnya. Teori dependensia merupakan teori politik yang mengaitkan hubungan komparatif antar bangsa khususnya antara negara maju (*developed*) dan negara berkembang (*developing*).

Tokoh-tokoh yang dianggap memberi kontribusi besar pada munculnya Teori Dependensia ini adalah Ekonom dari Argentina Raul Prebisch, seorang ahli dalam pemikiran strukturalis dan Fernando Henrique Cardoso (FHC) seorang sosiolog, guru besar ilmu politik, sekaligus pernah menjadi Presiden Brazilia. Meskipun Raul Prebisch dianggap sebagai pendahulu (*forerunner*)² Teori Dependensia, tetapi banyak kalangan mengatakan pemikiran Cardoso bisa memberikan gambaran yang lebih canggih berkait Teori Dependensia. Teori

¹ *Introduction To International Relation, Power And Justice*, Coulumbis & Wolfe, Prentice Hall Inc, 1986, hal.121

² Lihat *The Rise and Fall of Dependency Movement : Does it Inform Underdevelopment Today?*, Omar Sanchez, Jurnal E.I.A.L Vol 14-No.2, University of Oxford, 2003 hal 37

Dependensia bisa dipelajari dari karya Fernando Henrique Cardoso yang berjudul “*Dependency and Development in Latin America*”³

Menurut Kohli (2008)⁴ karya Cardoso “*Dependency and Development in Latin America*” merupakan karya brilian yang menyediakan analisis canggih menyangkut hubungan wilayah *enclave* dengan investasi asing. Tesis Cardoso tentang dependensia adalah keterbelakangan bukanlah produk dari kekenyalan masyarakat tradisonal, tetapi sebagai turunan ekspansi kapitalisme ke wilayah yang diasumsikan sebagai pinggiran (*pheripery*). Pembangunan dan keterbelakangan diibaratkan dua sisi koin kapitalisme. Dalam sebuah karyanya, *The Consumption of Dependency Theory in The United States*, Cardoso mengemukakan sebuah pernyataan menarik menyangkut ‘mitos pasangan’ dalam proses pembangunan di negara-negara Amerika Latin :

“jika seorang pengamat dari luar angkasa mendarat di UFO dan mengadakan beberapa pertemuan dengan Masyarakat Amerika Latin dalam tahun-tahun terakhir, dia akan setuju dengan para antropolog struktural dan mengatakan versi-versi dari mitos yang sama terulang : ketergantungan (*dependensi*) dan pembangunan, eksploitasi dan kesejahteraan, keterbelakangan dan teknologi canggih, pengangguran dan konsentrasi pendapatan.”⁵

Cardoso mengemukakan beberapa persoalan menyangkut perubahan sistem ekonomi di negara-negara kawasan Amerika Latin terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II dimana mereka menata kembali sektor industri dan memulai perubahan di bidang ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Produksi dan pasar direorganisasi pada saat bangkit dari depresi ekonomi Tahun 1929 dan beberapa kekuatan ekonomi negara Amerika Latin mengumpulkan sejumlah mata uang asing dan mengambil keuntungan dari proteksi pasar domestik. Negara-negara Amerika Latin akan melanjutkan keterkaitannya dengan pasar dunia untuk meyakinkan para pembeli atas produk impornya serta untuk memperoleh investasi asing. Jika tidak maka ekspansi pasar domestik menjamin keberlanjutan pembangunan yang sedang berjalan. “Industri Ekspor” masih akan

³ *Dependency and Development in Latin America*, Cardoso, Fernando Henrique, Faletto, Enzo University of California Press, 1979

⁴ Lihat *Nationalist versus Dependent Capitalist Development : alternative Pathways in Globalized World*, Kohli, Atul, Princenton University, 2008, hal 2

⁵ Lihat *The Consumption of Dependency Theory in The United States*, Cardoso, Fernando Henrique, Jurnal Latin American Research Review, Vol. 12. No 3, The Latin American Studies Association, 1977 hal 7-24

dibutuhkan untuk mempertahankan “kapasitas impor”, tapi pada dasarnya pembangunan akan ditentukan oleh pasar domestik, bukan pasar luar negeri.

Dalam proses dan struktur pembangunan, Cardoso mengenalkan sebuah istilah ‘*Reciprocal Determination*’ guna menggambarkan sebuah keinginan kuat untuk saling bekerjasama dan membantu. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap kegiatan ekonomi dengan sendirinya berkaitan dengan jaringan atau hubungan sosial, yang membutuhkan seperangkat kerjasama seperti halnya pemilik modal dan mesin yang memerlukan kaum buruh guna menjalankan produksinya dan sebagainya. *Reciprocal determination*⁶ dalam konteks yang lebih luas seperti halnya hubungan ekonomi antar negara, karena faktor-faktor tertentu, menjadi embrio adanya hubungan saling ketergantungan (dependensia).

Untuk menggambarkan pola ketergantungan ini, Cardoso mengkonstatir konsep ‘negara terbelakang’ sebagai antitesa dari ‘negara maju’ dan kawasan *periphery* sebagai lawan dari ‘kawasan pusat’. Keduanya digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara negara-negara Amerika latin dan Amerika utara (*industrialized countries*) dikaitkan dengan perbedaan faktor kesejarahan mereka.

Cardoso juga menjelaskan berbagai hubungan populisme dengan persoalan kebebasan berusaha (*free enterprise economy*), pembangunan nasional, dan Negara Pembangunan. Cardoso mengelaborasi konsep internasionalisasi pasar sebagai konsekuensi dari keadaan saling ketergantungan.

Pertama, melalui pembukaan pasar domestik terhadap kontrol pihak luar / asing. Ketika industri asing sedang mencari pasar baru, keadaan ini menjadi terhubung dengan kepentingan dalam negeri sebuah negara. Pada tahun 1950an, capital internasional mengalir deras dari negara-negara besar (*centers*) ke negara-negara berkembang (*periphery*). Hal ini menyebabkan terjadinya ledakan investasi baru yang menjadikan pasar domestik menjadi salah satu bagian dari akumulasi modal asing dalam struktur perekonomian dunia baik antar pemerintah (G to G) maupun swasta (C to C) atau gabungan keduanya. Penetrasi modal asing ini perlahan-lahan mempengaruhi struktur kebijakan pembangunan terutama dalam memberikan peluang ‘kontrol’ asing terhadap pasar domestik, jika iklim investasi ingin tetap terpelihara.

Kedua, Ketergantungan dan Pembangunan. Integrasi terhadap pasar dunia dari ekonomi negara-negara *periphery* terutama dalam hal ekspor agro industri menjadi bentuk

⁶ Lihat *Dependency and Development in Latin America*, Cardoso, Fernando Henrique, Faletto, Enzo University of California Press, 1979, hal 13

yang paling tepat untuk menggambarkan proses integrasi ini. Pasar ekonomi *periphery* menjadi terkait dengan pasar internasional dan di saat yang sama kapitalisme negara-negara maju tidak saja mempengaruhi sistem impor-ekspor tapi juga merambah secara langsung pada investasi pasar domestik yang baru.

Keadaan ini kemudian dimanfaatkan dalam rangka memacu pembangunan ekonomi di negara-negara *periphery* terutama dalam sektor industri, keuangan dan sebagainya. Dalam kaitan ini Cardoso menggunakan metode historis-struktural dan memfokuskan diri pada struktur internal dan aspek sosio politik (sebagai lawan aspek ekonomi) dari dependensia. Hubungan yang kompleks antara kekuatan internal dan eksternal (LN/DN), dominasi kelas lokal dan kalangan asing. Kekuatan asing (*external forces*) muncul melalui praktek-praktek aktor lokal yang mencoba memperkuat kepentingan asing dalam mendukung program mereka seperti pembelian persenjataan militer, masuknya MNC (*Multinational Corporation*), dan borjuasi lokal. Dependensia menurut Cardoso merupakan proses yang *open ended* / buka tutup (sebagai lawan dari *determinasi struktural*).



Gambar 1
Model Dependensia Cardoso

E. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian Trans Pacific Partnership dalam kampanye Presiden Amerika 2016 dan relevansinya bagi Indonesia ini, adalah studi pustaka untuk mengetahui dan memahami apa yang tersembunyi di balik isu tersebut secara mendalam (*insight*) dan menyeluruh (*whole*) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, b) mengumpulkan data, c) menganalisa data, d) merumuskan hasil studi dan, e) menyusun rekomendasi.

F. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Trans Pacific Partnership

Kerjasama Perdagangan Internasional, atau perdagangan antar bangsa disebabkan oleh beberapa hal seperti : Perbedaan jumlah penduduk, perbedaan pendapatan, perbedaan kesukaan dan perbedaan keanekaragaman barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dari negara yang satu dengan negara lain⁷. Munculnya perdagangan di antara negara-negara di dunia merupakan sebuah keniscayaan karena berbagai faktor di atas. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional juga bisa disebabkan oleh perbedaan harga relatif di antara negara-negara yang melakukan perdagangan⁸.

Dalam rangka mengamankan kepentingan perdagangan dan ekonominya secara umum, biasanya sebuah negara akan membuat kerjasama perdagangan dengan negara lain. Sebuah kerjasama perdagangan tidak pernah terlepas dengan persoalan kepentingan nasional (*national interest*) negara-negara yang membuatnya. Berbagai traktat atau perjanjian kerjasama internasional yang selama ini pernah dibuat selalu mengacu pada terpenuhinya kepentingan negara – negara pembuat perjanjian dan menjadi panduan kebijakan dari masing-masing negara tersebut dalam berbagai bidang. Kepentingan Nasional (*national interest*) itu bisa berupa isu ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya. Kepentingan Nasional tentu saja menjadi prasyarat utama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintahan sebuah negara.

Disamping untuk melakukan proteksi kepentingan nasional, perjanjian dan kerjasama internasional juga dibuat dalam rangka mengamankan kepentingan global. Dalam kaitan ini, Coulombis dan Wolfe⁹ memberikan sebuah pertanyaan mendasar menyangkut hubungan kepentingan nasional (*national interest*) dengan dengan kepentingan global (*global interest*): “*If we accept the proportion that is the bussiness of goverments to protect only their national interests, then whose business is it to protect global interest?*”

Salah satu isu yang mempertemukan kepentingan nasional dengan kepentingan global di bidang ekonomi adalah pengaturan perdagangan (*trade arrangements*). Pengaturan perdagangan bisa dalam berbagai bentuk seperti, penyatuan ekonomi (*economic unions*), pasar umum (*common market*), penyatuan bea cukai (*Customs unions*), dan daerah

⁷ *Ekonomika Keuangan Internasional*, Soedijono, AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hal 73

⁸ *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Sadono Sukirno, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2006, hal 121

⁹ *Introduction To International Relation, Power And Justice*, Coulumbis & Wolfe, Prentice Hall Inc, 1986, hal 122

perdagangan bebas yang sering diistilahkan dengan *Free Trade Area*¹⁰. Dalam sejarah perekonomian internasional sudah banyak dibuat berbagai perjanjian perdagangan bebas baik oleh dua negara, maupun kelompok negara atau kawasan. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang kini menjadi isu penting di belahan Asia Pacific adalah Trans Pacific Partnership (TPP) yang digagas sejak Tahun 2011 dan berhasil disepakati Tahun 2016 oleh 12 negara di Asia Pasifik.

Untuk kepentingan penelitian ini, menjadi menarik membaca karya Schmitter yang berjudul "*Economics and Differential Patterns of Political Integration*"¹¹. Schmitter secara detail mengkaji hubungan antar bangsa yang berkaitan dengan persoalan transisi struktural dalam studi komparasi politik dan obyek kajiannya secara khusus tentang integrasi politik dan ekonomi negara-negara Iberian (Amerika Latin) yang tergabung dalam LAFTA (*Latin American Free Trade Assosiation*). Karya Schmitter ini diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah integrasi ekonomi dalam sebuah kelompok bangsa-bangsa secara otomatis memicu penyatuan politik? Haruskah penyatuan ekonomi dilihat sebagai kesuksesan dalam rangka penyatuan politik?¹². Persoalan ekonomi politik di berbagai 'blok perdagangan' dan organisasi perdagangan internasional semacam CACM (*Central American Common Market*), *European Free Trade Assosiation* (EFTA) dan COMECON (*Commitions On the East European Council for Mutual Assistance*), OAMCE (*Organization Africaine et Malgache de Cooperation Economique*), West Indian Federation, EEC (*European Economic Community*, Masyarakat Ekonomi Eropa), OEEC (*Organization for European Economic Cooperation*), OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), dan beberapa blok lain digunakan Schmitter sebagai pembanding dalam penelitiannya berkait LAFTA.

Untuk memudahkan memahami kaitan intregrasi ekonomi dan politik kawasan di berbagai belahan dunia yang disampaikan Schmitter bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Penyatuan Ekonomi : Distribusi Pola Variabel Model Schmitter*

	OECD	Central American Common Market	LAFTA
Kondisi yang melatarbelakangi :			
1. Ukuran unit-unit	Rendah	Tinggi	Sedang
2. Rata-rata transaksi	Sedang	Rendah	Sedang

¹⁰ Lihat *Free Trade Agreements : Impact on US Trade and Implications for US Trade Policy*, Cooper, William H, CRS, Pebruari 2014. Hal 2

¹¹ Jurnal *International Organization* Volume 18 halaman 705-737, MIT Press No. 4, 1964

¹² Ibid, 705

3. Kemajemukan	Tinggi	Sedang	Sedang
4. Saling melengkapi di antara Elite	Sedang	Sedang	Sedang
Total Penilaian	Sedang	Sedang	Sedang
Kondisi pada saat Penyatuan Ekonomi			
5. Kebutuhan Pemerintahan	Rendah	Sedang	Rendah
6. Kekuatan Penyatuan	Rendah	Rendah	Rendah
Total Penilaian	Rendah	Sedang	Rendah
Kondisi Proses			
7. Pola Pengambilan Keputusan	Rendah	Rendah	Sedang
8. Rata-rata Transaksi	Sedang	Sedang	Sedang
9. Kemampuan adaptasi Pemerintah	Sedang	?	Sedang
Total Penilaian	Sedang	Sedang?	Sedang
Peluang Penyatuan Ekonomi dan Politik kawasan secara Otomatis	Diragukan	Dimungkinkan	Diragukan

(Keterangan : * dari sepuluh blok atau organisasi perdagangan dalam tabel ini hanya diambil 3 blok/ organisasi : OECD, CACM, dan LAFTA)

Menurut Schmitter, kondisi yang melatarbelakangi penyatuan adalah unit-unit ekonomi seperti industrialisasi, Pendapatan perkapita masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi. Rata-rata transaksi menyangkut kapasitas ekspor dan impor. Variabel Kemajemukan menyangkut struktur sosial dan nilai-nilai yang mengatur hubungan kelompok dan individu di negara anggota, sebagai contoh, kebanyakan perekonomian di negara-negara berkembang dikendalikan oleh personal dan pertalian keluarga. Struktur sosial ini juga menyangkut tingkat partisipasi kelompok perkotaan berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah. Variabel Saling melengkapi di kalangan elite ini menyangkut sikap elite atas nilai-nilai aristokrasi atau militer dalam kaitan penghormatan atas proses industrialisasi, perluasan aktifitas perdagangan, usaha swasta, kebebasan politik, urusan luar negeri.

Variabel kelima, Kebutuhan Pemerintahan atas sebuah blok perdagangan. Persoalan ini bisa dilihat dari tingkat keterlibatan pemerintah dan proses yang menyertainya. Sebagai contoh LAFTA (*Latin American Free Trade Association*), tingkat kebutuhan pemerintahan dinilai 'rendah' karena bukan diinisiasi oleh pejabat pemerintahan dari negara-negara anggota, tapi oleh ECLA (*Economic Community of Latin America*) yang dipimpin ekonom asal Argentina, sekaligus penggagas Teori Dependensia, Raul Prebisch. LAFTA juga digagas hanya melalui konferensi tahunan (*annual conference*) oleh ECLA, bukan pertemuan tingkat tinggi pemerintahan (*high level meeting*). Kekuatan penyatuan menyangkut konsensus di antara negara-negara anggota atas beberapa agenda.

Variabel ketujuh, menyangkut pola pengambilan keputusan. Dalam konteks LAFTA, pola pengambilan keputusan dinilai sedang karena tidak menjamin kecepatan untuk bisa sampai pada level supra nasional, akibatnya, koordinasi rencana pembangunan ekonomi, dan

inisiasi negosiasi untuk urusan tarif luar negeri tak ada yang bisa diadopsi dalam sebuah keputusan. Dalam transaksi di antara negara-negara LAFTA meskipun terjadi kenaikan sejak 1961, tetapi tidak signifikan dan tidak konsisten trendnya sehingga dinilai sedang. Kemampuan adaptasi pemerintah sebagai menyangkut pembuatan aturan atau badan baru sebagai respon yang memberikan iklim positif bagi tindak lanjut kerja sama. Penelitian Schmitter ini menunjukkan betapa pembangunan ekonomi kawasan di Amerika Latin ini tak memberikan 'nilai tinggi' dan tak terlalu efektif untuk memecahkan problem transisi dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Amerika Latin.

Dalam penelitiannya itu, Schmitter juga menyinggung peran ECLA (*Economic Community of Latin America*, Masyarakat Ekonomi Amerika Latin) dalam menyuarakan agar negara-negara Amerika Latin, yang berposisi *peripheri*, melepaskan 'ketergantungan' dari negara 'centre' dalam struktur pembangunan global jika ingin mempercepat proses industrialisasinya. Secara lengkap Schmitter mengatakan :

*ECLA seems to speak for many Latin Americans when it urges that rapid industrialization is possible in the hemisphere only if and when the Latin American countries sever the ties of dependence between their 'peripheral' economies and those 'centre' One way of achieving such a divorce is the preferential regional market.*¹³

Sebagai negara 'centre' yang selama ini sudah membuka banyak kesepakatan / perjanjian perdagangan bebas di berbagai kawasan, Amerika berupaya menjadikan ekonomi sebagai alat membuat pertimbangan-pertimbangan baru di dunia dengan melakukan penetrasi perdagangan. Menurut Papp (1984:319) sejak 1970, kekuatan ekonomi menjadi penentu (*determinant factor*) kekuatan aktor potensial di dunia internasional. Meskipun Amerika Serikat yang sejak Tahun 1950 hingga 1960an mendominasi perekonomian dunia, tetapi pada dekade 1970an mengalami masalah kronis di pertimbangan pembayaran dan mengalami defisit perdagangan¹⁴. Kondisi perekonomian Amerika Serikat pada era awal Presiden Obama berkuasa juga sempat mengalami kegoncangan akibat krisis finansial global. Dalam konteks perekonomian Amerika yang sering mengalami persoalan, wajar jika Trans Pasific Partnership sebagai sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang memiliki dampak perekonomian dalam jangka panjang dan luas skalanya, menjadi perhatian utama kandidat presiden dalam pemilu Tahun 2016 ini.

¹³ Lihat *Economics and Differential Patterns of Political Integration*, Jurnal *International Organization*, Vol. 18, MIT Press, 1964, Hal 729

¹⁴ *Contemporary International Relations, Frameworks For Understanding*, Papp, Daniel S, Macmillan Publishing Company, 1984, hal 319

Dalam sebuah dokumen berjudul *Trans Pacific Partnership (TPP) : Negotiations and Issues for Congress*¹⁵ setebal 61 halaman yang dibuat oleh CRS (*Conggressional Research Service*) Bulan Maret 2015, disebutkan beberapa hal penting berkait Trans Pacific Partnership (TPP). TPP adalah sebuah Proposal Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional (*Regional Free Trade Agreement*) antara Amerika, Australia, Brunei, Canada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. TPP digambarkan sebagai “ *a Comprehensive and High Standard FTA*” atau Sebuah Kesepakatan Perdagangan Bebas yang komprehensif dan berstandar tinggi yang akan membantu liberalisasi perdagangan di hampir semua barang dan jasa termasuk segala komitmen yang diatur dan dibuat di WTO (*World Trade Organization*). Garis besar kesepakatan TPP disampaikan pada pertemuan Menteri APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) di Honolulu, Hawaii Bulan Nopember 2011 yang menghasilkan 5 (lima) Pernyataan Para Pemimpin Tahun 2011 (*2011 TPP Leader Statement*) yakni : 1. Akses Pasar secara komprehensif (*Comprehensive Market Access*) berkait penghilangan penghalang beupa tarif dan non tarif dalam perdagangan. 2. Kesepakatan Regional (*Regional Agreement*) yakni kesepakatan yang secara penuh memfasilitasi perdagangan dan pengembangan produksi rantai suplai diantara negara-negara anggota TPP. 3. Memotong beberapa isu perdagangan (*Cross-cutting Trade Issues*) secara menyeluruh (*holistik*), Pendekatan jaring kesepakatan atas beberapa area spesifik menyangkut keselarasan pengaturan, persaingan dan fasilitasi usaha, UKM, dan pembangunan. 4. Tantangan Perdagangan Baru (*New Trade Challenges*) berkait isu-isu yang disebabkan oleh perkembangan teknologi baru, dan 5. Keberlangsungan Kesepakatan (*Living Agreement*) dimana TPP akan terus dibangun secara bertahap sebagai respon untuk mengembangkan pembangunan di bidang perdagangan, teknologi atau isu lain yang muncul.

Negoisasi berkait isi kesepakatan terjadi hampir 5 (lima) tahun, meski ada beberapa isu tersisa yang belum bisa dicarikan titik temu. Isu tersebut sangat sensitif karena memerlukan keputusan politik di negara-negara bersangkutan untuk bisa menjadi kesepakatan final. Berikut data berkait negara-negara Anggota Trans Pacific Partnership¹⁶.

¹⁵ *Trans Pacific Partnership (TPP) : Negotiations and Issues for Congress*, CRS (Congressional Research Service), 2015

¹⁶ Ibid, hal 2

Tabel 2
Negara-negara Anggota Trans Pacific Partnership

Nama Negara	Ada Kerjasama Perdagangan Bebas dengan AS	Jumlah Penduduk (dalam juta)	Produk Domestik Bruto (Miliar dolar AS)	Import Amerika (Miliar dolar AS)	Ekspor Amerika (Miliar dolar AS)	Neraca Perdagangan (Miliar dolar AS)
Australia	Ada	23,2	1.505	10,7	26,7	16,0
Brunei	Tidak ada	0,4	16	0	0,6	0,5
Kanada	Ada	35,1	1.825	346,1	312,1	-33,9
Chili	Ada	17,6	277	9,5	16,6	7,1
Jepang	Tidak ada	127,3	4.902	133,9	67,0	-67,0
Malaysia	Tidak ada	29,6	312	30,4	13,1	-17,3
Meksiko	Ada	118,4	1.259	294,2	240,3	-53,8
Selandia Baru	Tidak ada	4,5	181	4,0	4,3	0,3
Peru	Ada	30,9	207	6,1	10,1	4,0
Singapura	Ada	5,4	296	16,5	30,5	14,1
Vietnam	Tidak ada	89,7	171	30,6	5,7	-24,9
Amerika Serikat		316,4	16.800	Total 881,9	727,0	-154,9

Dengan menggunakan Teori Dependensia Cardoso, menyangkut hubungan *reciprocal determination* sebagai bagian dari hubungan saling ketergantungan, maka data di atas bisa kita analisa sebagai berikut : pertama, Amerika Serikat dan negara-negara lain anggota TPP memiliki hubungan saling bergantung dalam kegiatan perekonomian mereka dan proses ekspor dan impor adalah bagian dari skema *reciprocal determination* dalam konsep internasionalisasi pasar. Kedua, Amerika Serikat sebagai negara dengan PDB terbesar (16.800 miliar dolar) memiliki bargaining posisi yang kuat, sehingga bisa dikategorikan sebagai *center* yang ingin mengambil peran di negara-negara *periphery*. Sebagai *center*, Amerika memiliki peranan yang sangat penting dalam Trans Pacific Partnership.

2. Platform Partai dalam Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat

Dalam kehidupan politik Amerika Serikat isu ekonomi selalu menjadi sesuatu yang penting dan menjadi faktor determinan bagi seorang presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, atau dari lembaga-lembaga resmi negara. Miriam Budiardjo (1982) menjelaskan sebuah peristiwa menarik ketika pada Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt (1933-1945) mengambil alih pimpinan negara saat terjadi depresi ekonomi di Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah *malaise*. Untuk mengatasi resesi ekonomi, Roosevelt membuat kebijakan yang dinamakan *New Deal*, sebuah rencana pembangunan besar-besaran di bidang industri, pertanian, dan pekerjaan umum yang ternyata tidak disetujui oleh mayoritas anggota

Mahkamah Agung karena dianggap mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial baik di pusat maupun negara-negara bagian.¹⁷

Dalam proses pemilihan Presiden Amerika Serikat, dikenal tiga tahapan yang harus dilalui seseorang untuk bisa terpilih menjadi calon presiden. Menurut Saye dan Allums (1986 : 219)¹⁸ yakni *Pre Convention*, *Convention*, dan *Post Convention*. Ketiga tahapan ini membutuhkan strategi bagaimana mengangkat sebuah isu untuk dijadikan platform kampanye. Dalam konteks isu Trans Pacific Partnership ini, dasar pijakan platform partai menjadi penting, baik yang dibuat Partai Demokrat maupun Partai Republik. Platform Partai menjadi rujukan penting bagi calon presiden di internal partai pada tahapan *Convention* dan bagi calon presiden pemenang *Super Tuesday*¹⁹ di Setiap partai untuk tahapan *Post Convention*. *Super Tuesday* adalah tahapan rangkaian pemilihan internal partai, baik Partai Demokrat atau Republik yang sangat menentukan keberhasilan seseorang maju dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Guna mendapatkan gambaran seputar perdebatan isu Trans Pacific Partnership dalam kampanye Presiden Amerika 2016, perlu dicarikan basis sandaran perdebatan yang berkaitan dengan platform partai yang mengikuti kontestasi pemilihan presiden, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat dan Partai Republik telah menyiapkan sejumlah point-point yang mereka masukkan sebagai platform Partai dalam Pemilihan Presiden 2016 yang menjadi arah perjuangan para calon presiden untuk meraih simpati pemilih. Platform ini dibuat oleh Komite Konvensi Nasional masing-masing partai, bukan oleh kandidat presiden.

a. Platform Kampanye Partai Republik :

Partai Republik atau biasa disebut GOP (*Grand Old Party*) memiliki 6 agenda utama dalam Pemilihan Presiden 2016²⁰ yang dibuat oleh Komite Konvensi Partai Republik yang diketuai Senator Jhon Barrasso dan wakilnya, Gubernur Oklahoma dari Partai Republik Mary Fallin dan dan Anggota DPR Virginia Foxx dengan komposisi Sub komite untuk masing-masing agenda atau isu diambilkan dari anggota Konggres dari Partai Republik. Komite Konvensi Partai Republik ini juga memiliki 58 anggota komite yang berasal dari masing-masing negara bagian yang memiliki anggota DPR dari Partai Republik (29 negara bagian).

¹⁷ Dasar-dasar Ilmu Politik, Budiardjo, Miriam, Gramedia Jakarta, hal 149

¹⁸ *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, Napang, Yustika Press, Makasar, 2008, hal 52

¹⁹ *Super Tuesday and importance in the US Presidential Primary Election*, L Lorente, Cuenca, developing ideas, Madrid, 2016

²⁰ *Republican Platform 2016*, Committee on Arrangements for the 2016 Republican National Convension, 2016

Adapun enam agenda/ isu kampanye Partai Republik ini meliputi : 1. Memperbaiki Impian Amerika, 2. Melahirkan kembali Konstitusi Pemerintah, 3. Sumberdaya Alam Amerika (Pertanian, Energi, dan Lingkungan), 4. Reformasi Pemerintahan, 5. Keagungan Keluarga-keluarga Amerika (Pendidikan, Kesehatan, Keadilan Hukum), dan 6. Kebangkitan kembali Amerika. Keenam isu ini dipilah-pilah menjadi beberapa sub isu/ agenda yang berjumlah sekitar 76 (tujuh puluh enam) item.

Agar lebih fokus, maka agenda dan sub agenda yang tidak menyangkut persoalan ekonomi dikesampingkan dalam penelitian ini. Adapun Sub Agenda/ isu Partai Republik dalam kampanye Presiden 2016 yang menyangkut persoalan ekonomi adalah: membangun kembali ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (*Rebuilding the economy and Creating Jobs*), Perpajakan yang adil dan sederhana untuk pertumbuhan ekonomi (*Fair and Simple Taxes for Growth*), Prinsip-prinsip Pajak Kita (*Our Tax Principles*), Amerika yang Kompetitif (*A Competitive America*), membebaskan pasar keuangan, (*Freeing Financial Market*) dan memenangkan kebijakan perdagangan (*A Winning Trade Policy*),

Dua sub agenda Partai Republik terdapat item *Reforming The Treaty System* (reformasi sistem perdagangan) dan memenangkan kebijakan perdagangan (*A Winning Trade Policy*). Inilah sub agenda yang langsung berhubungan dengan persoalan perdagangan Amerika Serikat, termasuk di dalamnya penyikapan atas isu Trans Pacific Partnership (TPP). *Primary debates* di Partai Republik yang membahas sejumlah isu, termasuk isu ekonomi, dimulai sejak 5 Agustus 2015 hingga puncak tahapan internal di Partai Republik, *Republican National Convention*, sejak tanggal 18-21 Juli 2016.²¹

b. Platform Kampanye Partai Demokrat :

Partai Demokrat mengusung 12 (duabelas) isu / agenda utama dalam kampanye Pemilihan Presiden 2016 sebagaimana yang telah dirilis Panitia Platform Partai Demokrat pada Bulan Juli 2016²² meliputi, 1. Menaikkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian kelas menengah (*Raise incomes and Restore Economic Security for the Middle Class*), 2. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan pembayaran memadai (*Create Good-Paying Jobs*). 3. Memperjuangkan keadilan ekonomi dan melawan ketidakmerataan (*Fight for Economic Fairness and Against Inequality*) 4. Menjadikan masyarakat Amerika Serikat dalam kebersamaan dan membuang penghalang atas kesempatan-kesempatan (*Being Americans Together and Remove Barriers to Opportunities*), 5. Menjaga Hak-hak memilih, menetapkan

²¹ Lihat *Presidential Elections in America : A Primer*, Silvia, John E, Economics Group, 4 Agustus 2015, hal 1

²² *2016 Democratic Party Platform*, Democratic Platform Committee, 2016

sistem keuangan kampanye, dan memperbaiki demokrasi kita (*Protect Voting Rights, Fix Our Campaign Finance System, and Restore Our Democracy*), 6. Melawan perubahan iklim, dan membangun ekonomi energi yang bersih, dan keamanan lingkungan hidup (*Combat Climate Change, Build a Clean Energy Economy, and Secure Environmental Justice*), 7. Penyediaan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas (*Provide Quality and Affordable Education*), 8. Memastikan kesehatan dan keselamatan semua warga Amerika Serikat (*Ensure the Health and Safety of All Americans*). 9. Dukungan terhadap tentara dan memperjuangkan kesejahteraan kaum Veteran (*Support Our Troops and Keep Faith with Our Veterans*), 10. Melawan Ancaman Global (*Confront Global Threats*), 11. Menjaga nilai-nilai Amerika Serikat (*Protect Our Values*), dan 12. Kepemimpinan di dunia (*A Leader in The World*).

Adapun Sub agenda / sub isu kampanye Partai Demokrat terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) item dan sebagian diantaranya berhubungan dengan persoalan ekonomi adalah: menaikkan upah pekerja (*Raising Worker's Wages*), Menjaga hak-hak dasar pekerja (*Protecting Workers' Fundamental Rights*), Mendukung keluarga pekerja (*Supporting Working Families*), Dukungan ke UKM (*Supporting America's Small Businesses*), Menciptakan lapangan kerja bagi anak muda Amerika Serikat (*Creating Jobs for America's Young People*), Investasi di pedesaan Amerika Serikat, (*Investing in Rural America*) dan mengakhiri kemiskinan dan investasi di masyarakat tertinggal (*Ending Poverty and Investing in Communities Left Behind*), serta Promosi Perdagangan yang fair dan member keuntungan pekerja Amerika Serikat (*Promoting Trade That is Fair and Benefits American Worker*s).

Jika melihat sub agenda kampanye Partai Demokrat di atas, yang bersinggungan dengan persoalan Trans Pacific Partnership adalah. Beberapa kandidat Presiden dari Partai Demokrat sepanjang Kaukus Iowa & Nevada, New Hampshire & South Caroline Primaries Pada Bulan Pebruari 2016 dilanjutkan pada *Florida Primary* 15 Maret 2016 dan pada puncaknya di *Democratic National Convention* tanggal 25-28 Juli 2016²³, menggunakan berbagai isu ekonomi di atas, termasuk isu tenaga kerja dan kehadiran TPP ini dalam perdebatan-perdebatan mereka.

c. Hillary Clinton dan Donald Trump dalam isu Trans Pacific Partnership

Perdebatan antar kandidat merupakan bagian/ proses penting dalam pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Perdebatan ini bisa terjadi di internal partai, baik Demokrat maupun Republik, tetapi bisa juga di tahap *general election* dimana kandidat presiden yang mewakili masing-masing partai secara *head to head* berhadapan. Perang

²³ Lihat *Presidential Elections in America : A Primer*, Silvia, John E, Economics Group, 4 Agustus 2015, hal 2

pernyataan berkait isu Trans Pacific Partnership yang terjadi antara kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan dari Partai Republik mengemuka secara luas dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Tahun 2016. Hillary Clinton yang mewakili Partai Demokrat, dimana Presiden Obama berada dan sebagai bagian dari penandatanganan TPP, juga ‘mengoreksi’ kebijakan Obama berkait isu tersebut. Demikian pula kandidat dari partai Republik, Donald Trump yang juga berasal dari kalangan pebisnis Amerika, mengkritik secara luas kebijakan Trans Pacific Partnership. Beberapa point pernyataan berkait Trans Pacific Partnership antara Hillary Clinton dan Donald Trump bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Hillary Clinton dan Donald Trump
Dalam Isu Trans Pacific Partnership
(diolah dari beberapa sumber)

Hillary Clinton	Donald Trump
1. Meski pada awalnya mendukung Trans Pacific Partnership ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, tetapi Hillary Clinton mengatakan bahwa deal akhir TPP “tidak ketemu dengan standar saya.” 2. Ketua Tim Kampanye, John Podesta mengatakan bahwa Hillary Clinton melawan TPP baik sebelum maupun sesudah pemilihan (presiden) nanti. 3. Penasehat Ekonomi Kampanye, Gene Sperling mengatakan bahwa Hillary Clinton akan membuang inisiatif perdagangan baru termasuk TPP dan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, infrastruktur, reformasi imigrasi, dan perbaikan pendidikan tinggi, jaminan kesehatan keluarga 4. Hillary Clinton mengatakan akan berada di posisi melawan terhadap voting di Kongres berkait TPP. 5. TPP mengandung banyak lobang-lobang (<i>loopholes</i>), tidak cukup untuk membuka lapangan kerja dan menaikkan upah buruh.	1. Trump menyebut penunjukkan Tim Kaine sebagai Calon Wapres oleh Hillary Clinton sebagai wujud penghargaan atas Trans Pacific Partnership karena Kaine akan berusaha serius agar TPP bisa diterima. Dalam pernyataan di akun twitternya, Trump juga menyebut pendukung TPP sebagai ‘pembunuh pekerjaan (<i>job killer</i>)’ 2. Trump mengatakan Hillary dan suaminya, Bill Clinton sebagai orang yang memahami dan mendorong deal perdagangan yang mereka lakukan selama ini. Apa yang mereka lakukan termasuk adalah TPP sebuah bencana. 3. Trump juga menyebut, “TPP adalah muncul akibat tekanan sebuah keinginan khusus dari orang yang ingin memperkosa negara kami” 4. Dalam sebuah pidatonya yang berjudul, “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi Amerika”, Trump menyebut TPP akan menjadi kematian bagi industri manufaktur Amerika dan menyetujui TPP sama saja menyerahkan urusan ekonomi Amerika ke sebuah komisi internasional dengan meletakkan kepentingan mereka di atas kepentingan Amerika. TPP tidak saja akan melemahkan ekonomi Amerika, juga kemerdekaan Amerika.

	5. Trump menjelaskan posisinya untuk melawan TPP dan menyebut situasi ekonomi Amerika akan bertambah buruk jika TPP tidak dihentikan.
--	---

Jika dilihat dari sisi neraca perdagangan (*trade balance*), berdasarkan data yang disampaikan oleh CRS 2016²⁴, menunjukkan Amerika Serikat mengalami defisit terhadap 5 (lima) negara yakni Kanada, Jepang, Malaysa, Meksiko, dan Vietnam sebagai sesama anggota Trans Pacific Partnership dengan total nilai 154, 9 miliar dollar. Persoalan ini dianggap sebagai bagian dari terancamnya kepentingan nasional (*national interest*) di bidang ekonomi akibat penetrasi barang yang masuk ke Amerika Serikat dari beberapa negara anggota TPP yang tidak seimbang.

1. Isu Trans Pacific Partnership di Indonesia

Dalam sebuah kesempatan bertemu Presiden Amerika Barack Obama di Amerika Bulan Oktober 2015, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginan Indonesia bergabung dengan Trans Pacific Agreement (TPP). Persoalan TPP sebetulnya bukan barang baru bagi Indonesia. Di awal pembentukannya pada tanggal 18 Juli 2005, TPP hanya melibatkan 3 (tiga) negara : Selandia Baru, Chili, dan Singapura, dan berkembang menjadi 12 (duabelas) negara pada saat ditandatangani 4 Pebruari 2016. Pada Tahun 2011, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengatakan menolak bergabung dengan TPP dengan alasan dunia industri Indonesia belum siap berkompetisi dengan negara lain²⁵. Keinginan Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Jokowi untuk bergabung ke TPP ini tidak saja bertentangan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memunculkan reaksi yang sangat beragam di dalam negeri Indonesia. Tetapi keinginan Presiden Jokowi untuk memasukkan Indonesia ke Trans Pacific Partnership harus kita lihat sebagai keinginan untuk meningkatkan potensi ekspor kita ke negara-negara anggota TPP.

Dalam konteks neraca perdagangan (*Trade Balance*) beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Negara-negara anggota TPP memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan ekspor dan impor, dari dan ke Indonesia. Berikut data temuan dalam penelitian ini:

²⁴ *Trans Pacific Partnership (TPP) : Negotiations and Issues for Congress*, CRS (Congressional Research Service), 2015 hal 2

²⁵ Gita Wirjawan Tegaskan RI Tolak Ajakan Obama Masuk TPP, DetikFinance 15 Nopember 2011

Tabel 4
Ekspor Indonesia ke Negara-negara TPP Tahun 2015
(diolah dari data Departemen Perdagangan RI)

Nama Negara	Nilai Impor (Juta Dolar AS)	Prosentase (dari total ekspor ke seluruh dunia)
Amerika Serikat	15.308,0	10%
Australia	2.994,0	2%
Brunei	*	0%
Chili	*	0%
Jepang	13.096,0	9%
Kanada	722,0	0%
Malaysia	6.227,0	4%
Meksiko	803,0	0%
Selandia Baru	397,0	0%
Singapura	8.661,0	6%
Vietnam	2.736,0	2%
Peru	176,0	0%
TOTAL	51.120,0	33%

Keterangan : * diabaikan karena nilainya kecil sehingga oleh Departemen Perdagangan RI, Brunei dan Chili tidak dimasukkan ke dalam negara utama tujuan ekspor Indonesia.

Jika melihat dari data di atas, negara-negara anggota TPP memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena menguasai 33% 'pasar' produk Indonesia di luar negeri. Angka ini bisa lebih besar jika Brunei dan Chili dimasukan sebagai negara tujuan ekspor kita.

Tabel 5
Import Indonesia terhadap Negara-negara TPP Tahun 2015
(diolah dari data BPS Januari-Mei 2015)²⁶

Nama Negara	Nilai Impor (Juta Dolar AS)	Prosentase (dari total impor seluruh dunia)
Amerika Serikat	3.219,0	5,28%
Australia	2067,9	3,39%
Brunei	40,3	0,07%
Chili	65,9	0,11%
Jepang	6.027,7	9,89
Kanada	694,2	1,14%
Malaysia	3.849,6	6,31%
Meksiko	88,3	0,14%
Selandia Baru	303,1	0,50%
Singapura	7.458,4	12,23%
Vietnam	1.452,3	2,38%
Peru	*	*
TOTAL	25.266,7	41,44%

Keterangan : * diabaikan karena nilainya kecil sehingga oleh BPS, Peru tidak dimasukkan ke dalam negara pengimpor utama.

²⁶ Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, *Foreign Trade Statistical Bulletin Import/Imports*, Mei 2016, Badan Pusat Statistik

Jika melihat data BPS, total Volume Import Indonesia pada periode Januari-Mei 2015 sebesar 60.971 juta dolar AS dan 25.266,7 juta dolar (41,44%) berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) sebuah angka yang cukup besar.

Dalam konteks ketergantungan (dependensia), angka 41,44% yang disumbangkan negara-negara TPP dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, jelas sebuah angka yang cukup signifikan. Angka ini bisa lebih besar nilainya jika impor barang dari Peru²⁷ kita masukkan, tetapi karena nilainya kecil maka diabaikan dalam penelitian ini. Artinya, keinginan Presiden Jokowi untuk memasukkan Indonesia dalam TPP bukanlah tanpa dasar yang kuat, tetapi karena ‘faktor ketergantungan’ impor sebagai bagian dari kebutuhan dalam negeri kita terhadap negara-negara anggota TPP memang cukup besar.

Di luar konteks dependensia, ada juga faktor politik yang harus diantisipasi yakni tingkat persaingan Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan TPP seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam. Partisipasi Indonesia ke TPP, jika memang jadi dilakukan, sifatnya hanya ‘bergabung’ bukan pendiri TPP. Hal tersebut berbeda dengan keempat negara di atas, sehingga secara politik, posisi Indonesia hanya meratifikasi butir-butir perjanjian yang sudah ditanda tangani 12 (duabelas) negara pendiri, tanpa boleh mengutak-atik lagi. Hal tersebut menimbulkan kerawanan jika ada pasal yang secara teknis merugikan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia. Menteri Perdagangan era Jokowi, yang sekarang sudah direshuffle, Thomas Lembong pernah mengungkapkan kekhawatirannya jika Indonesia masuk ke Trans Pacific Partnership, terutama menghadapi Vietnam yang memiliki akses perdagangan lebih ‘dekat’ ke Amerika Serikat dan Uni Eropa²⁸. Kekhawatiran yang sama juga muncul dari kalangan ekonom, seperti Prof. Dr. Firmanzah, mantan Dekan FEUI dan kini menjadi Rektor Paramadina terutama berkait penyesuaian regulasi ekonomi jika Indonesia bergabung ke dalam TPP, sebagaimana dikutip The Jakarta Post :

“....the government to calculate the advantages and disadvantages of joining Trans Pacific Partnership (TPP) as the deal has gone far beyond a typical trade

²⁷ Menurut Ketua Divisi Pakan Aqua Culture Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GMPT), Denny Indrayana bahwa impor tepung ikan (*fish meal*) terbesar Indonesia berasal Peru dan Chili. Lihat link: *RI masih impor tepung ikan dari Peru*, www.detikcom

²⁸ Lihat, *Indonesia to Decide on Joining Trans-Pacific Partnership*, The New York Times, 25 Oktober 2015

*agreement.....it's not merely a trade agreement. But a uniformity across all aspect of the industry. If we insist on joining, many regulations will need to be revised"*²⁹

Menurut Firmanzah, bergabung dengan TPP tak sekedar berbicara tentang penghilangan tarif perdagangan antar negara-negara anggotanya, tetapi juga beberapa hal perlu disorot berkait *government procurement*, kebijakan persaingan, perlindungan hak cipta, regulasi perburuhan dan kebijakan lingkungan.

Akhirnya, diluar pro kontra TPP di Indonesia, harus juga diingat oleh Pemerintah Jokowi bahwa para kandidat Presiden di Amerika Serikat dalam kampanyenya meragukan efektifitas TPP yang telah disetujui Pemerintahan Obama Pebruari 2016. Para Kandidat presiden Amerika berpandangan bahwa skema kerjasama perdagangan bebas TPP akan membahayakan keselamatan industri manufaktur dan penciptaan lapangan kerja di Amerika. Dengan tingkat kemajuan industri manufaktur Amerika yang sudah sedemikian maju, tetapi masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan perekonomiannya akibat masuknya produk manufaktur dari negara-negara TPP lain yang secara kapasitas penguasaan teknologinya di bawah Amerika Serikat jelas menunjukkan betapa kompleksnya persoalan yang muncul dari sebuah perjanjian kerjasama perdagangan bebas. Fenomena ini juga menjadi cermin bahwa di antara negara-negara yang sudah menandatangani TPP itu sendiri masih menyimpan persoalan yang belum tuntas, sehingga Indonesia harus berhati-hati untuk memutuskan masuk tidaknya ke Trans Pacific Partnership.

2. Penutup

A. Kesimpulan

Sebagaimana temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, isu Trans Pasific Partnership, jika dihubungkan dengan kepentingan nasional (*national interest*), Amerika mengalami defisit terhadap 5 (lima) negara yakni Kanada, Jepang, Malaysa, Meksiko, dan Vietnam dengan total nilai 154, 9 miliar dollar. Di Amerika Serikat, terutama ketika masa kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2016, kedua kandidat Presiden, Hillary Clinton dan Donald Trump sama-sama menolak Trans Pacific Partnership karena dianggap tidak memberikan dampak ekonomi yang menguntungkan Amerika. Pro dan kontra atas Trans Pacific Partnership juga terjadi di Indonesia sebagai pihak yang ingin bergabung ke kesepakatan TPP. Berdasarkan Teori Dependensia Cardoso, kerjasama ataupun kesepakatan perdagangan yang ada di dunia, baik bilateral maupun multilateral tidak akan terlepas dari pola *rectprocal determtnatton* di

²⁹ *TPP will threaten Indonesia's state owned enterprise : expert*, The Jakarta Post 2 Nopember 2015

antara anggota-anggotanya baik melalui skema ekspor – impor maupun skema lainnya. Meskipun menjadi pola umum, *reciprocal determination* haruslah dalam kerangka menjaga kepentingan nasional (*national interest*) agar bisa tetap mendapatkan dukungan di internal masing-masing negara.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini maka ada beberapa point yang direkomendasikan : pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang dampak berbagai kesepakatan ataupun kerjasama perdagangan bebas lain dalam kaitannya dengan tingkat keamanan ekonomi Indonesia menghadapi persaingan bebas perdagangan. Kedua, Pemerintah Indonesia hendaknya menimbang ulang niatan untuk bergabung ke Trans Pacific Partnership (TPP), mengingat Amerika sendiri sebagai pihak yang mendirikan kesepakatan TPP justru menghadapi gelombang penolakan dari dalam negerinya, hal tersebut bisa dilihat dari sikap kedua calon presiden AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik dalam kampanye Presiden 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, Foreign Trade Statistical Bulletin Impor/Imports*, Mei 2016
- Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta, 1982
- Cardoso, Fernando Henrique, Faletto, Enzo, *Dependency and Development in Latin America*, University of California Press, 1979
- The Consumption of Dependency Theory in The United States*, Jurnal Latin American Research Review, Vol. 12. No 3, The Latin American Studies Association, 1977
- Coulumbis & Wolfe, *Introduction To International Relation, Power And Justice*, Prentice Hall Inc, 1986
- Committee on Arrangements for the 2016 Republican National Convension, *Republican Platform 2016*, 2016
- Cooper, William H, *Free Trade Agreements : Impact on US Trade and Implications for US Trade Policy*, CRS, Pebruari 2014

- CRS (Congressional Research Service), *Trans Pacific Partnership (TPP) : Negotiations and Issues for Congress*, 2015
- Current, Alfred, *American History, A Survey*, A Knopf, New York, 1963
- Democratic Platform Committee, *2016 Democratic Party Platform*, 2016
- Presidential Elections in America : A Primer*, Group, 4 Agustus 2015
- Papp, Daniel S, *Contemporary International Relations, Frameworks For Understanding*, Macmillan Publishing Company, 1984
- Perkins, Palmer, *International Relations*, CBS Publisher, Delhi, 1985
- Kohli, Atul, *Nationalist versus Dependent Capitalist Development : Alternative Pathways in Globalized World*, Princenton University, 2008
- LLorente, Cuenca, *Super Tuesday and Importance in the US Presidential Primary Election*, developing ideas, Madrid, 2016
- Morgenthau, HJ, *Politics among Nations The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf, (1949) 1967.
- Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, Yustika Press, Makasar, 2008
- Schmitter, Phillipe C, *Economics and Differential Patterns of Political Integration*, MIT Press, 1964
- , *Still The Century of Corporatism?*, Review of Politics Volume 36 No. 1, Januari 1974
- Silvia, John E, *Review of Politics* Volume 36 No. 1, Economics, Januari 1974
- Soedijono, *Ekonomika Keuangan Internasional*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Sukirno, Sadono *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2006
- The Jakarta Post, 2 Nopember 2015
- The New York Times, *Indonesia to Decide on Joining Trans-Pacific Partnership*, 25 Oktober 2015
- www.kemendag.go.id/
- www.detik.com, *DetikFinance* 15 Nopember 2011,